

KETIMPANGAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA



Skripsi Oleh :

NAMA : EKO PRASETYO JAYA WISUDA
NIM : 01043120020
KONSENTRASI : KEUANGAN DAERAH
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2011**

S.
352.407
Eko
K
2011

KETIMPANGAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA



Skripsi Oleh :

NAMA : EKO PRASETYO JAYA WISUDA
NIM : 01043120020
KONSENTRASI : KEUANGAN DAERAH
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
TAHUN 2011**

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi dari mahasiswa :

Nama : EKO PRASETYO JAYA WISUDA
NIM : 01043120020
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul : KETIMPANGAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA

Selanjutnya kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, Mei 2011

Pembimbing Skripsi

Ketua,

Anggota,



Dr. Azwardi, M.Si

NIP. 196805181993031003



Drs. Nazeli Adnan, M.Si

NIP. 195804171988101002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : EKO PRASETYO JAYA WISUDA
NIM : 01043120020
Jurusan : EKONOMI PEMBANGUNAN
Fakultas : EKONOMI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
KETIMPANGAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA

Pembimbing

Ketua : Dr. Azwardi, M.Si
Anggota : Drs. Nazeli Adnan, M.Si
Tanggal diuji : 06 Mei 2011

adalah benar-benar hasil karya saya di bawah bimbingan tim pembimbing.

Skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Inderalaya, Mei 2011
Yang memberi pernyataan,

METERAI
TEMPEL
FAKES KEKORANAN ANGKA
TGL

DEBE1AAF463883074

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

EKO Prasetyo Jaya Wisuda
NIM. 01043120020

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**

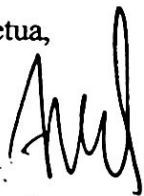
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : EKO PRASETYO JAYA WISUDA
NIM : 01043120020
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH
JUDUL SKRIPSI : KETIMPANGAN ANTAR PROPINSI DI INDONESIA

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 06 Mei 2011 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, Mei 2011

Ketua,



Dr. Azwardi, M.Si
NIP.196805181993031003

Anggota,



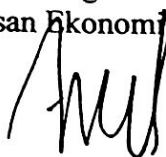
Drs. Nazeli Adnan, M.Si
NIP.195804171988101002

Anggota,



Drs. Komri Yusuf, M.Si
NIP.195310241980031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, M.Si
NIP.196805181993031003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui”. (Q.S Al-Ankabut: 64)

“Kehidupan ini ibarat jalan satu arah. Seberapa banyak pun perubahan rute yang anda tempuh, tidak satu pun akan membawa anda kembali. Begitu anda mengetahui dan menerima hal itu, kehidupan akan tampak menjadi jauh lebih sederhana”.
(Isabel Moore)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Bangsa dan Negaraku, Negara Kesatuan Republik Indonesia**
- **Keluargaku,**
Bapak: Ir. Tri Tunggal, M.Ag
Ibu: Vitalis Sri Mardya Ningsih
Adik-adik: Didit, Adi, Pipit
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *"Ketimpangan Antar Propinsi di Indonesia"*. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan antar wilayah di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. H. Syamsurijal, AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik penulis.
3. Prof. Dr. H. Taufik Marwah, Msi, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Azwardi, Msi selaku pembimbing I Skripsi dan Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Drs. Nazeli Adnan, M.Si selaku pembimbing II Skripsi dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya .
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Kedua orang tuaku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan pendanaan.
8. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
9. Teman-teman sejawat dan seangkatan di Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

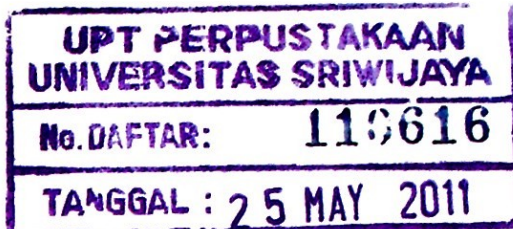
Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua Amin. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, kesalah serta keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengharapkan

kritik dan saran yang bersifat membangun agar menjadi pelajaran dalam penulisan-penulisan berikutnya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis ,

Eko Prasetyo Jaya Wisuda

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	7
1.3. Tujuan penelitian	7
1.4. Manfaat penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan teori	9
2.1.1. Pembangunan Ekonomi	9
2.1.2. Teori pertumbuhan ekonomi	10
2.1.3. Teori ketimpangan	12
a. Kurva Lorentz	13
b. Indeks atau Rasio Gini	14
c. Hipotesa Kuznets	14
d. Ketidakmerataan versi Bank Dunia	16
2.2. Penelitian terdahulu	20
2.3. Alur Pikir	23
2.4. Hipotesis	25

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian	26
3.2. Sumber dan Jenis Data	26
3.3. Batasan Operasional Variabel	26
3.4. Teknik Analisis	27
3.3.1. Ketimpangan Pembangunan	27
3.3.2. Analisis Determinasi dan Korelasi	29
a. Koefisien Korelasi	30
b. Koefisien Determinasi	30
3.3.3. Uji Statistik	30
a. Uji T	30
b. Uji F	31
3.3.4. Pengujian Ekonometrika	32
a. Uji Autokorelasi	32
b. Uji Multikolinieritas	33

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1. Keadaan Penduduk	38
4.1.2. Keadaan Ekonomi	42
4.1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto	42
4.1.2.2. Pendapatan Per Kapita	45
4.1.3. Keadaan Tenaga Kerja	47
4.1.4. Investasi di Indonesia	54
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Ketimpangan Antar Propinsi di Indonesia.....	59
4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Antar Propinsi di Indonesia	64
4.2.2.1. Uji Asumsi Klasik	66
4.2.2.2. Pengaruh PDRB Per Kapita Terhadap Ketimpangan Antar Propinsi di Indonesia	69
4.2.2.2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Antar Propinsi di Indonesia	69

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	71
6.2. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Persentase Distribusi Penduduk Berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 1971-2010	36
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Menurut Propinsi Tahun 2010	37
Tabel 4.3. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2001-2010	38
Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Propinsi Tahun 2001-2010	40
Tabel 4.5. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Propinsi Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2008	43
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto per kapita Menurut Propinsi Berdasarkan Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2008	45
Tabel 4.7. Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2002-2008	47
Tabel 4.8. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Propinsi Di Indonesia Tahun 2002-2008	50
Tabel 4.9. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2002-2008	51
Tabel 4.10. Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2002-2008	52
Tabel 4.11. Jumlah Pengangguran Menurut Propinsi di Indonesia Tahun 2002-2008	53
Tabel 4.12. Total Realisasi Penerimaan Investasi PMDN dan PMA di Indonesia Tahun 2002-2008	55
Tabel 4.13. Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia Menurut Lokasi Tahun 2001-2008	56
Tabel 4.14. Nilai Realisasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Menurut Lokasi Tahun 2001-2008	57
Tabel 4.15. Total Nilai Realisasi Penanaman Modal di Indonesia Menurut Lokasi Tahun 2001-2008	58
Tabel 4.16. Indeks Williamson Interregional di Indonesia dengan Migas tahun 2001-2008	61

Tabel 4.17. Indeks Williamson Interregional di Indonesia tanpa Migas tahun 2001-2008	63
Tabel 4.18. Regresi PDRB per kapita dan Investasi terhadap Ketimpangan antar Propinsi di Indonesia	65
Tabel 4.19. Uji Heterokedastisitas	66
Tabel 4.20. Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.21. Uji Autokorelasi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kurva Lorentz	13
Gambar 2.2. Kerangka Pikir Analisis	23
Gambar 3.1. Kurva Uji T Statistik	31
Gambar 3.2. Kurva Uji Autokorelasi	32
Gambar 4.1. Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2001-2010	39
Gambar 4.2. Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2001-2010	39
Gambar 4.3. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2001- 2008	44
Gambar 4.4. Grafik Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 2002 – 2008.....	48

ABSTRACT

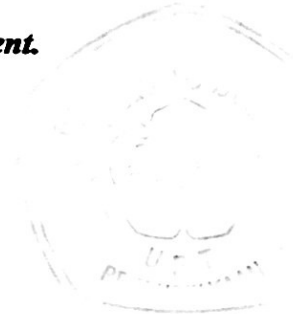
Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially in developing countries. This study aimed to calculate the level of inequality in the area of Indonesia and to analyze the influence of independent variables GDRP per capita and investment on regional development disparities in the Indonesia in the period 2001 to 2008.

This study uses secondary data consists of data coherent with the time from 2001 until 2008 which was obtained from Badan Pusat Statistik South Sumatera (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). This research method are Williamson Index in counting the imbalance of regional economic development in Indonesia during 2001-2008 and multiple linear regression method.

Calculation result showed that disparity of regional economic development in Indonesia by natural oil and gas still high which is 0.81 and without the natural and gas is about 0,84. The highest disparity inter-state (province) in indonesia with natural oil and gas was clearly seen in Kalimantan Island which is 0.86. The lowest is in Sulawesi Island with 0.22. The disparity inter-state in Java island without natural oil and gas become the highest one with 0.87 and again, 0.22 in Sulawesi island is the less in the disparity inter-state without natural oil and gas

Based on the independent variables of GDRP per capita and investment regression, it was negatively influence or significantly not influence the disparity inter-province in Indonesia.

Keyword: Inter-state Development Disparity, GDRP per capita, Investment.



ABSTRAKSI

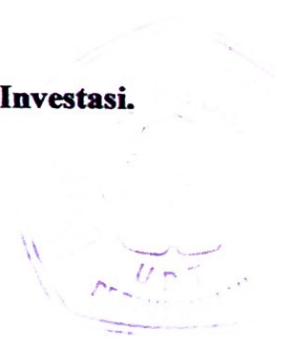
Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Indonesia, serta menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita dan investasi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 2001 sampai dengan 2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data runtut waktu dari 2001 sampai dengan 2008 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah Indeks Williamson dalam menghitung ketimpangan pembangunan ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu 2001 sampai dengan serta metode regresi linier berganda.

Hasil perhitungan indeks menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antar wilayah dengan migas yang terjadi di Indonesia dikategorikan tinggi yaitu sebesar 0.81 sedangkan tingkat ketimpangan antar wilayah di Indonesia tanpa migas lebih besar yaitu sebesar 0.84. Pulau yang memiliki ketimpangan antar wilayah dengan migas paling besar di Indonesia adalah pulau Kalimantan yaitu sebesar 0.86 sedangkan pulau yang memiliki tingkat ketimpangan paling kecil adalah pulau Sulawesi yaitu sebesar 0.22. Tingkat ketimpangan antar wilayah tanpa migas paling besar dimiliki oleh pulau Jawa yaitu sebesar 0.77 sedangkan pulau yang memiliki tingkat ketimpangan paling kecil adalah pulau Sulawesi yaitu sebesar 0.22.

Berdasarkan hasil regresi, variabel PDRB per kapita dan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antar propinsi di Indonesia.

Kata Kunci : Ketimpangan Pembangunan Wilayah, PDRB per kapita, Investasi.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu proses di mana PDB riil atau pendapatan riil per kapita penduduk meningkat secara terus menerus melalui kenaikan produktivitas per kapita (Wiratmo, 1992:4). Pembangunan ekonomi yang dinyatakan dengan peningkatan output dan pendapatan riil per kapita itu memang bukan satu-satunya sasaran kebijakan di negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, kebijaksanaan ekonomi dalam menaikkan tingkat pertumbuhan output perlu dilakukan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat yang diperlukan untuk perbaikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai prasyarat untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lainnya seperti penyediaan sarana dan prasarana sosial.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap proses produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi yang akan turut meningkat (Susanti, 2000:23).

Menurut Tambunan (dalam Farid 2007:2), pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan terus terjadi dan berarti kebutuhan ekonomi juga akan bertambah besar, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Konsekuensi yang harus dihadapi atas fenomena di atas adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk agar pertumbuhan pendapatan per kapita dapat tercapai. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diorientasikan untuk peningkatan pendapatan per kapita, dapat menyebabkan pola pembagian dari pertumbuhan itu sendiri kurang diperhatikan, sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas pendapatan di masyarakat. Walaupun demikian, di dalam teori pembangunan ekonomi adanya disparitas merupakan kondisi perlu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, yang mengandung makna bahwa pada awal pembangunan (untuk menggenjot angka pertumbuhan) diperlukan pembangunan yang terkonsentrasi di satu atau beberapa daerah.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa campur tangan pemerintah untuk setiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah. Jika perkembangan ekonomi diserahkan pada mekanisme kekuatan pasar biasanya akan cenderung memperbesar ketidakmerataan antar daerah karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di satu daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin tertinggal. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi di suatu daerah akan

menimbulkan kerugian bagi daerah-daerah lain sehingga terjadinya migrasi besar-besaran yaitu migrasi tenaga kerja, modal, perdagangan, dan lain-lain.

Pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang tinggi telah memperlihatkan keberhasilan secara memuaskan di berbagai bidang dan sektor pembangunan serta meningkatnya pendapatan perkapita, kesempatan kerja, ekspor dan struktur perekonomian yang beralih dari sektor pertanian ke industrialisasi. Namun ternyata pertumbuhan yang tinggi itu telah mengakibatkan bertambah lebarnya kesenjangan atau ketimpangan antar golongan masyarakat (antara si kaya dan miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal). Kesenjangan atau ketimpangan antar daerah ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin lebar dan tajam (Adisasmita, 2005:10).

Seperti yang dikemukakan oleh Wie (dalam Dini 2008:8), negara yang semata-mata hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan pendistribusian pendapatan tersebut, akan memunculkan ketimpangan-ketimpangan diantaranya adalah :

1. Ketimpangan pendapatan antar golongan atau ketimpangan relatif

Ketimpangan yang terjadi antar golongan ini sering kali diukur dengan menggunakan koefisien Gini. Kendati koefisien Gini bukan merupakan indikator yang ideal mengenai ketimpangan pendapatan antar berbagai golongan, namun sedikitnya angka ini dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola distribusi pendapatan

2. Ketimpangan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat juga ditinjau dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan (*urban-rural income disparities*). Untuk membedakan hal ini, digunakan dua indikator : (1) perbandingan antara tingkat pendapatan per kapita di daerah perkotaan dan pedesaan, dan (2) disparitas pendapatan daerah perkotaan dan daerah pedesaan (perbedaan pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Menurut Bank Dunia, pola pembangunan Indonesia memang memperlihatkan suatu *urban bias* dengan tekanan berat pada sektor industri, yang merupakan landasan bagi ketimpangan distribusi pendapatan kemudian hari.

3. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah

Satu lagi sisi lain dalam melihat ketimpangan distribusi pendapatan nasional adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia, yang mengakibatkan pula terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antar daerah (*regional income disparities*). Ketimpangan pendapatan seperti ini disebabkan oleh karena penyebaran sumberdaya alam yang tidak merata serta perbedaan dalam laju pertumbuhan antar daerah, dan belum berhasilnya usaha-usaha pembangunan yang merata antar daerah di Indonesia.

Perlu pula diperhatikan bahwa ketimpangan ini hanya menyajikan gambaran makro mengenai ketimpangan dalam tingkat pendapatan rata-rata antar berbagai daerah atau propinsi di Indonesia, dan tidak memperlihatkan pola distribusi pendapatan antara berbagai golongan masyarakat di dalam satu daerah atau propinsi.

Selanjutnya Adelman dan Morris (dalam Arsyad, 1999: 226-227), ada delapan proses yang telah menimbulkan ketimpangan yang pada suatu wilayah (pada level propinsi ataupun negara), diantaranya:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar subwilayah (atau daerah yang lebih kecil).
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang intensif modal sehingga persentase pendapatan dari harta bertambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan substitusi-impor industri yang menyebabkan kenaikan harga barang-barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.
7. Memburuknya *term of trade* bagi wilayah (daerah atau negara) yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan wilayah maju (daerah atau negara) sebagai akibat ketidak elastisan permintaan wilayah maju.
8. Hancurnya industri-industri rakyat, seperti: pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lainnya.

Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat menunjukkan adanya indikasi telah terjadi pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya pemerataan pendapatan. Sebaliknya pembangunan industrialisasi akan memperbesar tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

Latar belakang demografi, geografis, ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama serta kapasitas sumber daya yang berbeda menyebabkan konsekuensi adanya keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan aliran modal dan tenaga kerja berbeda di setiap daerah. Aliran modal dan tenaga kerja akan cenderung tertarik ke daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pola pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Konsentrasi kegiatan ekonomi akan berpusat kepada daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga perekonomian antar daerah di Indonesia menjadi tidak seimbang dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah. Pembangunan di daerah yang tingkat pembangunan ekonominya tinggi cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pembangunan di daerah yang tingkat kegiatan ekonominya rendah.

Perbedaan tingkat pendapatan antar provinsi di Indonesia berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup manusia, antara lain tingginya ketimpangan pendapatan baik itu pendapatan regional maupun pendapatan perkapita masyarakatnya. Masih terpolarisasinya investasi pada daerah-daerah “core”, ketimpangan pembangunan antar desa dan kota, pembangunan infrastruktur yang masih berfokus pada daerah-daerah tertentu, dan lemahnya kemampuan provinsi dalam pelaksanaan otonomi daerah, serta ketimpangan pembangunan dalam provinsi itu sendiri merupakan masalah yang belum diatasi. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul **“Ketimpangan antar propinsi di Indonesia”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar propinsi di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketimpangan antar propinsi yang ada di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan timbulsari penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Menambah dan memperkaya bahan kajian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan ilmu ekonomi regional dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi.

b. Manfaat operasional

Melalui informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan sumbangan, masukan bagi pelaksanaan pembangunan kawasan yang lebih terarah dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akita, T. and R.A.Lukman. "Interregional and Equalities in Indonesia: A Sectoral Decomposition Analysis for 1975-92." *Bulletin of Indonesian Economics Studies*, 31 (2): 61-81, 1995.
- Angelia, Yuki. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Propinsi DKI Jakarta Tahun 1995-2008". *Skripsi*. Program S1 Reguler FE Universitas Diponegoro, Semarang
- Aprilia, Dini. 2008. "Ketimpangan Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan". *Skripsi*. Program S1 Reguler FE UNSRI, Indralaya
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik propinsi Sumatera Selatan. *Statistik Nasional Indonesia Angka edisi 2001-2009*. Palembang
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Farid dan Ferry Irawan, Miftah. 2007. *Pengaruh Disparitas Antardaerah dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Data Panel Propinsi*. Disampaikan dalam Parallel Session IVC : Trade IV tanggal 13 Desember 2007 Jam 13.00-14.30 di Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga
- Irianti, Tiara. 2009. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Program S1 Reguler FE UNSRI, Indralaya
- Kuswara, Gagan. 2006. Analisis Keterkaitan Antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Tesis*. Program Pasca Sarjana FE UNSRI, Palembang.
- Leirissa, RZ, GA Ohorella, dan Yuda B. Tangkilisan. 1996. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: Jakarta.
- Lee, Hock-Ann, Kian-Ping Lim, and M. Azali, 2005. "Income Disparity between Japan and ASEAN-5 Economies, Catching Up or Diverge?."
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Noegroho dan Lana Soelistianingsih, Yoenanto Sinung. 2007. "Analisis Disparitas Pendapatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Regional". Disampaikan dalam Parallel Session IVA : Urban & Regional tanggal 13 Desember 2007 Jam 13.00-14.30 di Universitas Indonesia.
- Panorama, Maya, 2002. Analisis Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Selatan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.

- Szorfi, Bela. 2007. " *Development and Regional Disparities – Testing the Williamson Curve Hypothesis in the European Union*"
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: FE-UI
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Ekonometrika Pengantar*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Syafrizal. 2000. *Ketimpangan Ekonomi Daerah: Tendensi Penyebab dan Kebijakan Pengolahan*. Makalah ini disampaikan dalam kongres ISEI.XIV, Makasar 21-23 April 2000.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia, Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat
- Tambunan, Tulus. 2004. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan: Kasus Indonesia*. Jakarta: FE Trisakti
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antardaerah di Indonesia*. Disampaikan dalam Parallel Session : Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, jam 13.15-14.45 di Universitas Indonesia
- World Bank. 1997. *World Development Report 1997-The State in a Changing World*. Washington, DC: World Bank
- www.bps.go.id Diakses pada tanggal 23 desember 2010.
- www.wikipedia.org Diakses pada 18 oktober 2010